Proyek ini didanai oleh
Uni Eropa

MODUL PELATIHAN

PENGENALAN DAN PENDEKATAN GEDSI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK RENTAN SEBAGAI RESPONS PANDEMI COVID-19

Bagi Pendamping Pemberdayaan Ekonomi Produktif Masyarakat

Proyek ACTION

(*Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19*)
(Warga Aktif Membangun Solidaritas dan Ketahanan dalam Merespon Dampak Pandemi)

Modul Pelatihan Pengenalan dan Pendekatan GEDSI dalam Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Rentan sebagai Pandemi COVID-19 bagi Pendamping Pemberdayaan Ekonomi Produktif Masyarakat

Penulis:
Mukhotib MD
Nurul Saadah Andriani
Sholih Muhdlor
Sri Surani

Editor:
Nurul Saadah Andriani
Nobertus Mario Baskoro

Desain dan Tata Letak:
Nobertus Mario Baskoro

Ilustrasi:
Fikri Muhandis
Mukhotib MD

Copyright April, 2022
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

Buku ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan di dalam materi buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab SAPDA dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.

Pengantar

Pendekatan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya belum mempertimbangkan kelompok marginal khususnya penyandang disabilitas. Pelatihan para mentor juga hanya menyajikan materi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum. Memang, sebagian sudah ada yang sedikit lebih maju dengan memberikan materi prinsip-prinsip aksesibilitas dan tips komunikasi dengan ragam disabillitas.

Modul pelatihan ini hendak mengisi ceruk kosong pemberdayaan ekonomi dengan memasukkan perspektif gender dan disabilitas. Tanpa berdiri sendiri, modul ini menjadi bagian dari serangkaian modul lain, seperti modul pelatihan penanganan kekerasan dan modul *Climate Smart Disaster Risk Management* (CSDRM) yang semuanya menggunakan perspektif gender dan disabilitas.

Secara substansial, modul pelatihan ini menaruh perhatian kepada prinsip-prinsip pelatihan aksesibel, penyediaan bahan bacaan dan silabus sebagai peta penyajian materi, tetapi tidak menyajikan soal-soal metode dan media pembelajaran. Dengan asumsi, setiap pendamping pemberdayaan ekonomi yang sekaligus menjalankan peran fasilitator sudah memiliki pengalaman yang memadai dalam menyampaikan materi pelatihan. Dengan begitu, para pengguna modul ini memiliki kebebasan berkreasi untuk menentukan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan peserta pelatihan.

Ada beberapa bagian penting dalam modul ini yang membutuhkan eksplorasi lebih jauh di dalam penggunaannya, antara lain:

1) Prinsip dasar dalam melakukan pelatihan pemberdayaan ekonomi dengan perspektif disabilitas untuk mendorong proses pelatihan yang lebih aksesibel bagi semua peserta, termasuk penyandang disabilitas.

2) Substansi konsep gender dan disabilitas dan cara kerjanya dalam isu pemberdayaan ekonomi, hambatan dan tantangan dalam pemberdayaan ekonomi bagi komunitas penyandang disabilitas, khususnya perempuan dengan disabilitas, upaya memastikan perempuan disabilitas mendapatkan kesetaraan dan kesamaan hak pemberdayaan ekonomi, serta teknis perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi program yang partisipatif.

3) Silabus pelatihan sebagai contoh alur proses penyajian materi pelatihan secara lebih sistematis untuk membantu peserta memahami konsep dengan baik.

Daftar Isi

Pengantar i
Daftar Isi ii
Penggunaan Modul iii

Bagian I: Pendahuluan 01
1.1 Latar Belakang 01
2.2 Tujuan Khusus 02
2.3 Tujuan Umum 02
2.4 Materi, Metode, dan Silabus Pelatihan 02

Bagian II: Teori dan Konsep
2.1 Pemahaman tentang Disabilitas 03
2.2 Pemahaman tentang Gender (Keadilan, Kesetaraan dan Afirmasi Gender) 07
2.3 Keterkaitan Gender dengan Disabilitas 10
2.4 Inklusi Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi bagi Kelompok Rentan 11
2.5 Gender dan Disabilitas: Analisis dalam Pemberdayaan Ekonomi Inklusif 16
2.6 Advokasi Inklusi Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi 20
2.7 Prinsip Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas 21
2.8 Penjangkauan, Pendampingan, dan Fasilitasi Penyandang Disabilitas 22
2.9 Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran 23
2.10 Strategi Penyampaian Informasi bagi Penyandang Disabilitas 24

Bagian III: Silabus Pelatihan 29

Penutup 32

Daftar Pustaka 33

Penggunaan Modul

Modul pelatihan ini adalah bagian dari modul pemberdayaan ekonomi sebagai modul terapan atau modul khusus. Modul ini bisa disampaikan sebelum materi mengenai diskusi strategi pemberdayaan ekonomi kelompok rentan atau bisa dijuga disampaikan pasda sesi akhir pelatihan.

Kendati demikian, modul pelatihan ini bisa digunakan secara terpisah dari pelatihan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan. Dalam kata lain, modul pelatihan ini bisa berdiri sendiri, sebab telah memberikan tiga ranah yang secara umum menjadi capaian pelatihan, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan.

Modul pelatihan menggabungkan teori dan konsep, contoh kasus dan praktik baik, mengintegrasikan isu-isu relevan lain dengan isu disabilitas (*crosscutting*) dan juga praktik langsung. Dengan begitu, penggunaan modul pelatihan ini harus memastikan akomodasi yang layak serta aksesibilitas fisik dan non fisik untuk memudahkan semua orang, antara lain peserta (calon *trainer*), pelatih/narasumber dan panitia dengan ragam kondisi dapat berpartisipasi secara bermakna selama proses pelatihan.

Secara teknis, fasilitator sebagai pengguna modul bisa menggunakan bagian-bagian modul sesuai kebutuhan di lapangan. Misalnya, ketika peserta dinilai telah memahami dengan benar tentang pengertian disabilitas, maka sesi mengenal disabilitas tidak perlu dilangsungkan atau cukup melakukan penyegaran.

Walaupun yang menjadi peserta pelatihan menurut modul ini adalah para fasilitator pendamping program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, tetapi modul ini juga bisa diikuti peserta yang hendak mengembangkan media informasi yang aksesibel dengan menggunakan perspektif gender dan disabilitas.

Bagian I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan dan memicu terjadinya perubahan sosial, ekonomi, kesehatan serta praktik-praktik keagamaan. Perubahan-perubahan yang tidak dapat terhindarkan ini memaksa seluruh lapisan masyaraat menghadapinya dengan melakukan berbagai macam adapatasi untuk bisa bertahan hidup.

Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, transpuan, dan kaum miskin menjadi kelompok yang paling berat menghadapi situasi wabah ini. Mereka perlu mendapatkan berbagai intervensi peningkatan kemampuan dalam beradaptasi agar mampu bertahan dan keluar dari situasi pandemi dengan tetap bermartabat.

Bagi penyandang disabilitas, persoalannya menjadi tidak sederhana karena sangat berkaitan dengan tingkat pemahaman dan ketersediaan informasi yang aksesibel. Keterlibatan penyandang disabilitas yang sangat rendah dalam proses-proses diseminasi informasi dan perencanaan program membuat penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan mengungkapkan kebutuhannya dan tidak bisa turut berpartisipasi aktif menjadi agen perubahan.

Tentu saja, penyandang disabilitas tidak akan bisa melibatkan dirinya sendiri secara langsung tanpa ada dukungan dan intervensi dari para pihak yang memiliki kepentingan terkait program pembangunan, seperti pemerintah, lembaga non pemerintah, dan pegiat kebencanaan yang berperan secara langsung dalam isu penanganan pandemi COVID-19 dan situasi bencana lainnya.

SAPDA dengan dukungan pendanaan Uni Eropa melangsungkan Proyek ACTION (*Active Citizenz Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19* atau Masyarakat Aktif Membangun Solidaritas dan Ketahanan Menghadapi COVID-19). Tujuan umum proyek ACTION adalah meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam mencegah, menangani, memitigasi resiko dan kerentanan yang terkait dengan krisis COVID-19. Sementara tujuan khusus yakni meningkatkan ketahanan, solidaritas masyarakat miskin dan terpinggirkan

dalam menanggapi dampak pandemi COVID-19. Ruang lingkup tindakan proyek ACTION yakni 1) Mendukung masyarakat dan pemerintah pada semua tingkatan untuk menangani keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19, dan 2) Mendukung pemulihan sosial dan ekonomi.

1.2 Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelatih pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perspektif *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) dalam melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam gerakan penanganan pandemi COVID-19 dan kebencanaan yang menjadi semangat program kolaborasi dan Konsorsium ACTION.

1.3 Tujuan Khusus

1) Meningkatkan pemahaman dasar tentang gender dan disabilitas.

2) Meningkatkan pemahaman konsep inklusi sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3) Meningkatkan keahlian merancang pendekatan dan melakukan pendampingan dan peningkatan level usaha penyandang disabilitas sebagai pelaku usaha baru.

4) Meningkatkan keahlian dalam melakukan pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

1.4 Materi, Metode, dan Silabus Pelatihan

a) Materi: Rancangan materi akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mengenai konsep dan perspektif gender-disabilitas, etika berinteraksi dengan ragam penyandang disabilitas, penjangkauan kelompok penyandang disabilitas, dan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

b) Metode: Penyampaian materi di dalam modul pelatihan menggunakan metode Pendidikan Orang Dewasa (POD) dengan meyakini bahwa semua orang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Fasilitator hanya membantu peserta menemukan atau memproduksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman peserta.

c) Peserta: Calon pendamping pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.

Bagian II

Teori dan Konsep

2.1 Pemahaman tentang Disabilitas

1) Pengantar

Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keragaman seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, dan sistem nilai yang berbeda-beda. Keragaman menjadi sesuatu yang alamiah. Manusia bertumbuh dan mengembangkan dirinya dalam latar keberagaman.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki rentang keberagaman paling luas, baik dalam hal fisik dan kemampuan, kapasitas intelektual, dan kondisi mental/psikologis. Keragaman ini pun berdampak pada kemampuan melakukan adaptasi dan bertahan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Pengertian Disabilitas

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau CRPD) menyebut disabilitas sebagai konsep yang terus berkembang. Disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan.

Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebut penyandang disabilitas sebagai "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

Kedua hukum utama mengenai disabilitas di atas memberikan mandat bahwa segala upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas harus berdasarkan kesetaraan atas dasar hak asasi manusia dengan mengubah pola pikir, sikap, perilaku manusia, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian lingkungan untuk memampukan penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas bisa dilakukan secara tepat dengan pemahaman yang baik tentang ragam disabilitas serta kebutuhan khusus untuk dapat berdaya dan berpartisipasi aktif sebagai anggota masyarakat secara penuh tanpa diskriminasi.

3) Ragam Disabilitas

CRPD tak membuat klasifikasi tentang ragam disabilitas, CRPD dirumuskan berdasarkan pada semangat kesetaraan penuh yang tidak lagi melihat disabilitas sebagai persoalan impairment semata, tetapi lebih kepada bagaimana interaksi sosial manusia terbentuk. CRPD merupakan sebuah panduan umum bagi setiap negara yang menandatangani dan memiliki komitmen melaksanakan isi CRPD.

Namun, ragam disabilitas bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan uraian berikut:

a. **Penyandang Disabilitas Fisik,** yaitu terganggunya fungsi gerak seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebralpalsy* (CP) akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

b. **Penyandang Disabilitas Intelektual,** yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.

c. **Penyandang Disabilitas Mental,** yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Ragam disabilitas ini mencakup:

   - Psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.

   - Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif.

d. **Penyandang Disabilitas Sensorik** yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, seperti Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu dan/atau Disabilitas Wicara.

Masing-masing ragam disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi kebutuhan mobilitas dan kebutuhan berinteraksi. Kebutuhan mobilitas berkaitan dengan kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan/atau menggunakan alat gerak yang ada pada tubuhnya. Kebutuhan berkaitan dengan kemampuan untuk saling berhubungan satu sama lain dalam rangka berinteraksi, berkomunikasi, mendapat informasi dan mengemukakan pendapat. Kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas, antara lain:

a. Kebutuhan Disabilitas Fisik

Penyandang Disabilitas Fisik memerlukan kebutuhan khusus yang dapat mendukung mobilitas dan pergerakan anggota tubuhnya. Kemampuan serta kemandirian Disabilitas Fisik bermobilitas sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas lingkungan sekitar, seperti ketersediaan *ramp* atau bidang miring, *handrail* atau pegangan tangan, dan juga kontur jalan tidak bergelombang. Alat bantu mobilitas seperti tongkat maupun kursi roda menjadi kebutuhan utama bagi Disabilitas Fisik untuk dapat bermobilitas secara mandiri.

Dalam berinteraksi, Disabilitas Fisik cenderung tidak begitu mengalami hambatan, kecuali beberapa sub ragam Disabilitas Fisik seperti *cerebralpalsy* yang memiliki keterbatasan berbicara dan menulis karena gangguan pada salah satu atau semua anggota gerak bagian atas dan keterbatasan berbicara karena masalah pada organ bicaranya (pita suara, rahang, lidah). Untuk situasi ini, *speech synthesizer* (penyintesis ucapan) sangat membantu komunikasi mereka dengan orang lain.

b. Disabilitas Intelektual

Penyandang Disabilitas Intelektual tidak terlalu mengalami masalah pada anggota gerak tubuhnya ataupun kemampuannya dalam bermobilitas. Mereka lebih sering mengalami hambatan mengenali lingkungan, menghafal jalan dan mengingat. Latihan berulang-ulang dengan menggunakan perintah sederhana akan membantu mereka melakukan kegiatan sehari-hari secara rutin.

Dalam berkomunikasi, Disabilitas Intelektual sulit memahami kalimat panjang dan kompleks. Mereka mudah untuk pasif dan terkesan tidak peduli saat berkomunikasi. Penyandang Disabilitas Intelektual membutuhkan media komunikasi yang sederhana dan menyenangkan, seperti poster, dan peraga tiga dimensi.

Mereka juga cenderung menyukai aktivitas fisik daripada pembicaraan yang panjang dan melelahkan. Penyandang Disabilitas Intelektual juga rentan merasa bosan sehingga aktivitas yang dilakukan bersamanya hendaknya tidak monoton dan tidak terlalu lama.

c. Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas Mental tidak memiliki kendala dalam mobilitas, menggerakkan anggota tubuh dan kapasitas intelektual. Mereka dapat secara leluasa bergerak, menggunakan anggota tubuh, memahami, dan mengenali lingkungan sekitarnya. Penyandang Disabilitas Mental juga tidak mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka tidak mengalami keterbatasan berbicara, mengingat, memahami sesuatu, dan mengungkapkan pendapat atau perasaannya.

Kondisi yang membuat Disabilitas Mental berbeda adalah kondisi psikisnya. Secara umum, mereka memiliki kondisi emosional yang cenderung lebih cepat berubah dan sulit diprediksi serta *mood swing* sangat tajam berganti. Situasi yang menguras emosi, seperti rapat yang penuh konflik atau situasi-situasi serupa lainnya membuat Disabilitas Mental kehilangan kendali atas diri mereka atau *relapse*. Ketika berinteraksi, berikanlah waktu yang cukup bagi mereka agar dapat lebih cepat mengambil kendali atas kondisi psikis.

d. Disabilitas Sensorik

Terdapat dua ragam disabilitas sensorik dengan kebutuhan khusus yang berbeda dan cenderung bertolak belakang, yaitu sensorik pendengaran (Disabilitas Tuli) dan sensorik penglihatan (Disabilitas Netra). Kedua sub ragam disabilitas sensorik tersebut tidak mengalami masalah pada kemampuan intelektualnya. Mereka dapat sepenuhnya memahami dan mengolah informasi sepanjang dengan cara yang benar.

Disabilitas sensorik penglihatan memiliki kemampuan bermobilitas yang bervariasi tergantung kemampuan melihatnya. Penyandang Disabilitas Netra total (*full blind*) akan sepenuhnya bergantung dengan rabaan tangan dan kemampuan orientasi medan. Sementara Disabilitas Netra yang mempunyai penglihatan rendah (*low vision*) cenderung masih mampu bermobilitas dengan bantuan sisa penglihatannya.

Penyandang Disabilitas Netra tidak memiliki hambatan menggerakkan anggota tubuh. Dalam bermobilitas, mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk menunjukkan sesuatu dan mengenalkan tempat yang baru hanya pada saat pertama kali. Untuk selanjutnya, Disabilitas Netra dapat melakukan mobilitas secara mandiri.

Sementara Disabilitas Tuli tidak mempunyai masalah dalam melakukan mobilitas dan menggerakkan anggota tubuh, bahkan dapat mengoperasikan kendaraan secara penuh tanpa kesulitan.

Berbeda dengan Disabilitas Netra yang bergantung pada suara dalam berkomunikasi, Disabilitas Tuli mengandalkan visual. Kemampuannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi ditentukan menurut metode komunikasi yang digunakan. Berteriak kepada seorang Tuli sama tidak bergunanya dengan menunjukkan gambar kepada Disabilitas Netra.

2.2 Pemahaman Tentang Gender (Keadilan, Kesetaraan, dan Afirmasi Gender)

1) Pengantar

Gender sebagai konsep memiliki tujuan untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keseharian pada peran domestik dan peran publik. Perjuangan kesetaraan ini, di dalam prosesnya, berhasil mengubah budaya dan pola pikir masyarakat terkait gagasan mengenai pembagian peran antara laki-laki perempuan secara lebih setara dan adil.

Bagi perempuan penyandang disabilitas, perjuangan tersebut menjadi lebih kompleks. Sebab mereka tidak hanya berhadapan dengan konsep perempuan dan laki-laki, tetapi juga dengan persoalan disabilitas dengan segala hambatan dan tantangannya. Perempuan penyandang disabilitas memiliki persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar menggeser peran yang sepenuhnya domestik menjadi peran publik. Secara umum, hak perempuan penyandang disabilitas untuk dapat melaksanakan peran domestiknya pun masih mengalami hambatan dan tantangan karena stigma ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan yang ada di masyarakat.

2) Gender dan Seks

Gender mengacu pada pembedaan antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi secara sosial yang dipengaruhi berbagai faktor seperti budaya, agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, media, seni, dan sebagainya. Sebagai bentukan sosial, gender bisa berubah sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan budaya.

Sementara seks atau jenis kelamin mengacu pada pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan karakterisitik biologisnya. Berbeda dengan gender, seks tidak bisa berubah, kecuali melalui proses operasi ketubuhan. Perbedaan lebih lengkap antara gender dan seks dapat disimak melalui ilustrasi berikut:

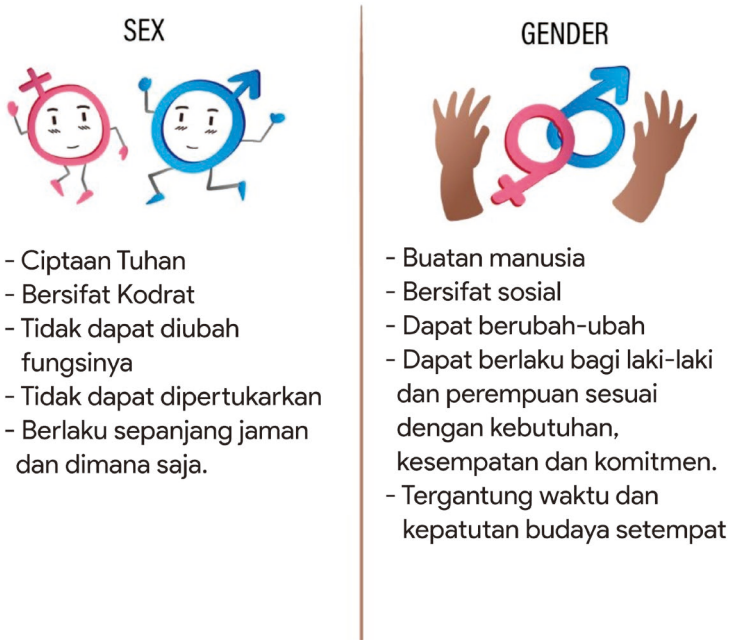

Ilustrasi 1: Perbedaan Seks dan Gender
Oleh: Fikri Muhandis

3) Keadilan, Kesetaraan dan Afirmasi Gender

Keadilan gender adalah suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat di dalam pembangunan. Sementara kesetaraan merupakan suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Sedangkan afirmasi gender adalah tindakan pembedaan pada kelompok tertentu berbasis gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Tindakan ini bersifat sementara (berjangka waktu tertentu) sampai dengan kondisi yang diharapkan dapat terjadi.

Afirmasi gender bertujuan untuk:

a. Memastikan kebutuhan khusus yang dapat terungkap, ditangkap dipahami bersama dan dicatat sebagai prioritas pembangunan.

b. Menemukan prioritas pemenuhan kebutuhan dan tahapan yang dibutuhkan sebagai proses peningkatan kapasitas perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.

Terdapat beberapa kelompok afirmasi gender yang sering menjadi sasaran program perlindungan sosial milik pemerintah, antara lain anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, kelompok miskin, dan penyintas bencana.

Ilustrasi 2: Daftar Kelompok Afirmasi Gender
Oleh: Fikri Muhandis

2.3 Keterkaitan Gender dengan Disabilitas

Bicara tentang keterkaitan antara gender dan disabilitas tidak sama dengan membicarakan perempuan disabilitas, melainkan membahas konstruksi hubungan yang tercipta karena identitas gender yang dipilih dan ragam kedisabilitasan yang disandang.

Di dalam isu gender, terdapat isu disabilitas yang beragam, misalnya:

a. Adanya perempuan yang mempunyai anggota keluarga disabilitas.

b. Adanya kemunduran/perubahan kondisi fisik/sensorik sehingga seorang lanjut usia baik laki-laki atau perempuan yang menjadikannya penyandang disabilitas, dan

c. Adanya situasi kekerasan fisik dan psikologis yang menyebabkan kelompok gender minoritas menyandang kedisabilitasan.

Demikian juga di alam isu juga disabilitas terdapat isu gender, di antaranya:

a. Relasi gender pasangan disabilitas.

b. Beban ganda pada perempuan yang mempunyai anak penyandang disabilitas.

c. Kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas terkait dengan peran dan fungsi domestik dan reproduktif.

d. Isu seksualitas pada perempuan penyandang disabilitas yang sering kali dianggap aseksual atau justru hiperseksual.

e. Isu kemampuan dalam melakukan aktivitas seksual dan pembuahan pada laki-laki Disabilitas Fisik Paraplegia, dimana mereka dianggap tidak mampu melakukan aktivitas seksual dan memberikan keturunan kepada perempuan.

f. Isu mengenai ketidakadilan gender dan disabilitas yang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

   - Subordinasi, seperti perempuan yang diposisikan lebih rendah dan dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki atau penyandang disabilitas yang dinilai tidak penting dibandingkan orang tanpa disabilitas. Bahkan laki-laki disabilitas juga dianggap kurang penting peran atau pendapatnya dibanding laki-laki non disabilitas.

- Marginalisasi dan diskriminasi, seperti peminggiran ekonomi, pelayanan publik, pembedaan, dan pengurangan hak karena jenis kelamin dan disabilitas.

- Beban ganda, yaitu adanya pembagian tugas yang memberatkan salah satu jenis kelamin, termasuk kepada perempuan disabilitas dan perempuan yang mempunyai anak penyandang disabilitas.

- Kekerasan, yaitu bentuk-bentuk serangan terhadap fisik, integritas psikologis, seksual, dan ekonomi.

- Stereotip, yaitu pelabelan atau bentuk generalisasi perilaku individu-individu dari anggota kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, kondisi tubuh, mental maupun intelektual, serta hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kedisabilitasan, termasuk dalam komunikasi.

2.4 Inklusi Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi bagi Kelompok Rentan

Bahasan mengenai inklusi sosial adalah bagian penting untuk menyampaikan informasi tentang kondisi ideal yang seharusnya terjadi di masyarakat atau secara khusus dalam ruang lingkup pemberdayaan ekonomi. Kondisi ideal yang dimaksud di sini adalah situasi sosial yang memberikan ruang dan dukungan terhadap anggota kelompok tersebut secara adil sesuai dengan kebutuhan individu sehingga usaha yang dibangun dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berkelanjutan dalam jangka waktu lama serta berdampak langsung kepada kesejahteraan individu dan keluarga yang bersangkutan.

Terdapat beberapa inti bahasan yang sebaiknya disampaikan dan menjadi bahan diskusi bersama peserta dalam pelatihan, yaitu :

1) **Situasi dan proses inklusi sosial dalam masyarakat,** menyampaikan peran dan posisi kelompok rentan dan penyandang disabilitas di dalam masyarakat saat ini dan situasi ideal yang seharusnya ada.

2) **Apa itu inklusi?** Inklusi dipahami sebagai pendekatan dalam membangun dan mengembangkan lingkungan terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, gender, dan budaya dalam lingkungan sosial.

3) **Apa itu eksklusi sosial?** Ekslusi sosial yaitu peminggiran-pengeluaran seseorang dari interaksi /pembuatan keputusan/aktivitas sosial karena memiliki perbedaan dari sebagian besar anggota kelompok/masyarakat.

4) **Pemahaman tentang perbedaan konsep eksklusi, integrasi dan inklusi**

   a. **Eksklusi:** keluar dari lingkaran utama.

   b. **Integrasi:** masuk dengan adanya pengelompokan maupun penentuan posisi dalam kelompok besar/utama sehingga tidak memengaruhi kemapanan dan kondisi anggota lain.

   c. **Inklusi:** masuk dan berinteraksi untuk dapat berpartisipasi dan memengaruhi kelompok yang lebih besar.

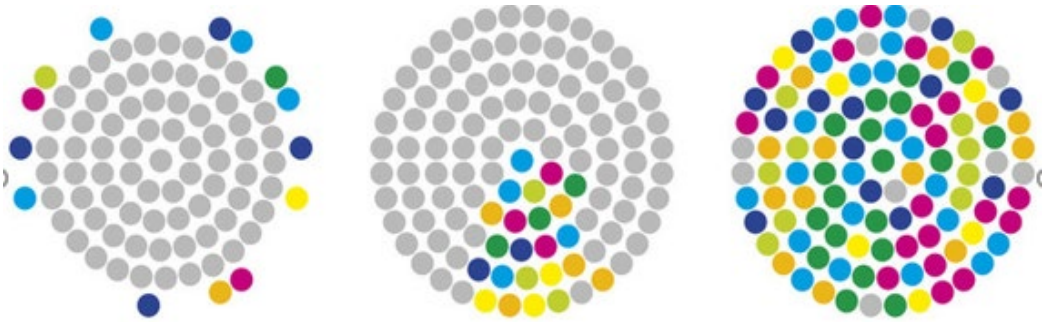

Ilustrasi 3: Gambaran Eksklusi (Kiri), Integrasi (Tengah) dan Inklusi (Kanan)
Oleh: Mukhotib MD

Proses ini pun lebih lanjut bermaksud menyampaikan bahwa program-program yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah dan berbagai pihak dapat dibagi menjadi beberapa kemungkinan, yaitu:

a. **Eksklusi,** bahwa implementasi progam sering kali dijalankan/dikontribusikan serta menguntungkan bagi kelompok yang berada di lingkaran kecil dengan keseragaman latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi atau hak lainnya. Orang lain yang dianggap berbeda tidak dapat masuk/dimasukkan ke dalam kelompok kecil yang tertutup tersebut.

b. **Integrasi,** bahwa program memberikan ruang kepada mereka yang berbeda suku, disabilitas, jenis kelamin, umur, dan sosial ekonomi untuk masuk ke dalam kelompok besar, tetapi dengan lokalisir sehingga memudahkan untuk dipantau atau bahkan dikeluarkan dari kelompok besar tanpa mempengaruhi anggota kelompok mayoritas.

Situasi ini misalnya dapat ditemukan pada kelas khusus disabilitas di sekolah umum dengan guru khusus, proses belajar mengajar khusus serta ruang interaksi khusus sehingga murid disabilitas tidak mendapatkan kesempatan untuk berbaur dengan murid lain tanpa disabilitas. Dalam isu pemberdayaan ekonomi, ini terlihat dengan adanya ruang pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas di balai latihan kerja.

c. **Inklusi,** bahwa program memasukkan individu yang berbeda dari kelompok mayoritas ke dalam kelompok sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya upaya untuk memastikan adanya kesetaraan selama proses tersebut.

5) Kenapa inklusi sosial dalam pemberdayaan ekonomi penting?

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan ekonomi, yaitu:

a. Sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa terlibat atau tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi/aktivitas ekonomi dalam masyarakat perlu terlibat secara langsung dan tidak langsung.

b. Dalam prinsip ekonomi berkeadilan tidak mengedepankan semata-mata pada hasil/keuntungan, tetapi memperhatikan proses, partisipasi, dan pemerataan manfaat kepada banyak pihak.

c. Banyak potensi kontribusi sumber daya kelompok rentan di dalam masyarakat hilang/tidak terpakai/terbuang karena standar “normalitas dan efisiensi” yang sering digunakan.

d. Keadilan dan kesetaraan membutuhkan proses dan dukungan yang disebut aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Ilustrasi 4: Perbedaan *Equality* (Keadilan) dan *Equity* (Kesamaan)
Oleh: Fikri Muhandis

6) **Terjadinya eksklusi penyandang disabilitas dan kelompok rentan di dalam program dan aktivitas pemberdayaan ekonomi disebabkan karena:**

   a. Stigma ketidakmampuan/tidak produktif/cacat/tidak normal.

   b. Ketidaksengajaan untuk meminggirkan/kebiasaan/budaya.

   c. Keterbatasan sumber daya yang melahirkan kompetisi "siapa yang kuat dan mempunyai akses adalah yang dapat."

   d. Pemikiran kapitalisme, yang memicu strategi usaha dengan modal yang sedikit dan sumber daya yang efektif untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Dengan kata lain, menyingkirkan mereka yang dianggap tidak produktif, tidak efisien, atau mengeluarkan modal lebih banyak.

   e. Jumlah kelompok yang sedikit, tersembunyi, tidak terjangkau, tidak bersuara, dan kebijakan yang tidak mendukung.

7) **Bagaimana praktik-praktik eksklusi terjadi dalam program pemerintah dan program pemberdayaan lainnya?**

Penyandang disabilitas sering kali tidak masuk ke dalam daftar calon penerima program pelatihan pemberdayaan ekonomi, pemagangan atau bantuan sesuai dengan kebutuhan. Mereka juga tidak masuk ke dalam daftar penerima beasiswa pelatihan tingkat ahli hingga adanya seleksi tertulis/tidak tertulis untuk pelatihan tentang keahlian tertentu karena stigma yang melekat tentang kemampuan dan kapasitas mereka. Akibatnya, pihak yang merancang dan mengimplementasikan program akan mengeksklusikan orang-orang yang dianggap tidak masuk dalam lingkaran sebagai "penerima dukungan program yang tepat". Salah satu hal yang melanggengkan eksklusi di sini adalah tidak adanya kesempatan menyampaikan pendapat tentang proses yang tidak adil ini, bagaikan perancang program dengan penyandang disabilitas terpisah oleh jembatan yang putus. Adapun beberapa hal yang menjadi alasan dari proses eksklusi ini adalah kuatnya persepsi tentang rendahnya produktivitas/kemampuan penyandang disabilitas, biaya yang mahal untuk pengadaan dukungan bagi penyandang disabilitas.

8) **Bagaimana integrasi dan inklusi program dijalankan dalam pemberdayaan ekonomi?**

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghubungkan penyandang disabilitas dengan tanpa disabilitas di dalam aktivitas dan program yang sama dan setara, misalnya seperti membuka jembatan komunikasi dan interaksi tanpa stigma dan persepsi apapun dari kedua belah pihak (penyandang disabilitas dan masyarakat tanpa disabilitas serta perancang program) atau dapat melalui upaya membuka pintu lingkaran kelompok mayoritas tanpa disabilitas pelaku usaha bagi penyandang disabilitas untuk dapat saling berinteraksi, memahami, dan juga mendukung.

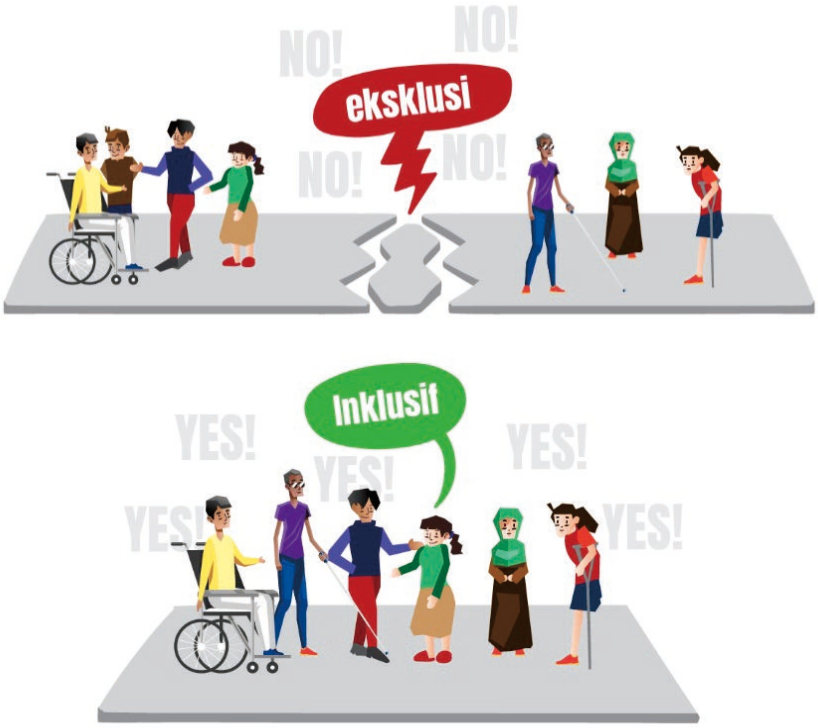

Ilustrasi 5: Perbedaan Inklusi dan Eksklusi
Oleh: Fikri Muhandis

2.5 Gender dan Disabilitas: Analisis dalam Pemberdayaan Ekonomi Inklusif

Upaya melihat secara jeli dan akurat terwujudnya atau tidak keadilan dan kesetaraan gender-disabilitas bisa dilakukan menggunakan 4 indikator sebagai pisau analisa, yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (AKPM) di ruang domestik maupun publik.

1) Konsep kesetaraan-keadilan gender dan disabilitas.

Kesetaraan gender dan disabilitas dalam masyarakat memperhatikan kesetaraan di ruang domestik yaitu keluarga, lingkungan keluarga dan ruang publik yaitu lingkungan sosial masyarakat dan pembuatan kebijakan. Pemetaan tersebut berguna dalam mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi di dalam masyarakat. Alat analisis ini disebut dengan analisis gender dan disabilitas *pathway*, sebagai perluasan dari analisis gender *pathway* dengan pisau analisis yakni akses, kontrol, partisipasi dan manfaat.

2) Situasi pemberdayaan ekonomi di ruang domestik bagi kelompok rentan.

Beberapa pertanyaan penting yang perlu menjadi perhatian dan bahan diskusi adalah sebagai berikut:

a) Seberapa besar perempuan dan penyandang disabilitas mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi di rumah yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha?

b) Seberapa besar suara perempuan dan penyandang disabilitas dihargai dan didengarkan dalam pengalokasian sumber daya di rumah dan pengambilan keputusan bersama terkait kerumahtanggaan dengan tujuan pemberdayaan/ kemandiriaan ekonominya?

c) Seberapa besar perempuan dan penyandang disabilitas memiliki kontrol atas usaha ekonomi produktif yang berjalan dengan sumber daya atau modal dari rumah tangga/keluarga?

d) Seberapa besar perempuan dan penyandang disabilitas memperoleh manfaat atas usaha ekonomi produktif yang berjalan dengan sumber daya/modal dari rumah tangga/keluarga?

Indikator	Apa saja yang harus diperhatikan
Akses	Sumber daya (uang, properti, ruang usaha, tenaga, kendaraan).
Partisipasi	- Pengambilan keputusan untuk pengalokasian sumber daya. - Partisipasi di dalam perencanaan usaha.
Kontrol	- Kepemilikan usaha (nama, akta pendirian) beserta asetnya. - Kewenangan untuk mengatur usaha. - Kewenangan untuk mengatur sumber daya dan keuntungan.
Manfaat	Keuntungan usaha berupa uang/barang/ aset.

Catatan: apa yang disebutkan di tabel ini hanya contoh dan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi pelatihan.

Analisa AKPM terhadap situasi ketidaksetaraan penyandang disabilitas dalam pemberdayaan ekonomi di ruang publik dapat dipahami melalui beberapa kasus di bawah ini:

- **Akses:** perempuan penyandang disabilitas yang tinggal bersama keluarganya sering kali tidak mendapatkan akses atas sumber daya seperti hasil pertanian/ keuangan/aset yang dapat digunakan sebagai modal usaha atau jaminan di bank untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak dapat mengelola sumber daya dan tidak dapat bertanggungjawab atasnya. Sehingga sumber daya tersebut mengatasnamakan anggota keluarga lain yang memposisikan diri sebagai pengampu.

- **Kontrol:** perempuan Disabilitas Mental dan Disabilitas Fisik sering kali tidak mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Semua keputusan ekonomi terhadap dirinya ditentukan dan dikontrol oleh keluarga, seperti keputusan untuk mengikuti kursus keterampilan, memilih usaha yang akan dikelola, memilih ruang usaha atau bahkan pemilihan bantuan.

- **Partisipasi:** Disabilitas Tuli sering kali tidak memiliki akses untuk berpartisipasi di dalam perencanaan peruntukan dan penggunaan tata ruang di rumahnya, misalnya sebagai ruang produksi, ruang usaha, ruang keluarga karena adanya hambatan interaksi dan komunikasi dengan anggota keluarganya yang lain. Akibatnya sering kali Disabilitas Tuli harus menerima apa saja yang diberikan dan diputuskan terhadapnya tanpa adanya partisipasi di dalam pembuatan keputusan.

- **Manfaat:** Disabilitas Mental, Intelektual, dan Netra sering kali tidak bisa mendapatkan manfaat atas usaha yang mereka kelola sendiri. Pasangan atau anggota keluarga lain menganggap kedisabilitasan yang mereka sandang menjadi penghambat di dalam kegiatan pengelolaaan usaha. Sehingga usaha hanya diatasnamakan penyandang disabilitas, tetapi pengelolaan atau bahkan keuntungan diambil alih oleh anggota keluarga lain, sementara mereka hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan/manfaat.

3) Situasi pemberdayaan ekonomi di ruang domestik bagi kelompok rentan.

Beberapa pertanyaan penting yang perlu menjadi perhatian dan bahan diskusi adalah sebagai berikut:

a) Seberapa besar perempuan dan penyandang disabilitas mempunyai akses sumber daya ekonomi yang dialokasikan pemerintah pusat/daerah/desa untuk dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha?

b) Seberapa besar suara perempuan dan penyandang disabilitas dapat dihargai dan didengarkan dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan?

c) Seberapa perempuan dan penyandang disabilitas dapat memberikan kontrol terhadap usaha ekonomi produktif yang direncanakan secara mandiri dengan sumber daya dari pemerintah pusat/daerah/desa?

d) Seberapa besar perempuan dan penyandang disabilitas dapat mengambil manfaat dari program usaha ekonomi produktif dari pemerintah pusat/daerah /desa?

Indikator	Apa saja yang harus diperhatikan
Akses	- Sumber daya (modal usaha, ruang usaha, pelatih, transportasi). - Informasi tentang sumber daya pemberdayaan ekonomi yang ada.
Partisipasi	- Pengambilan keputusan untuk pengalokasian sumber daya. - Partisipasi di dalam perencanaan pemberdayaan ekonomi.
Kontrol	- Kekuasaan untuk memilih usaha yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. - Kontrol atas produk yang dibuat.
Manfaat	- Keuntungan usaha berupa uang/ barang/aset. - Keuntungan berupa jaringan usaha, pembelian, dan peningkatan kapasitas.

Catatan: apa yang disebutkan dalam tabel ini hanya contoh dan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi pelatihan.

Analisa AKPM terhadap situasi ketidaksetaraan penyandang disabilitas dalam pemberdayaan ekonomi di ruang publik dapat dipahami melalui beberapa kasus di bawah ini:

- **Akses:** mayoritas penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses informasi terkait program-program pemberdayaan ekonomi dari pemerintah atau pihak lain. Informasi biasanya disampaikan melalui media elektronik/media massa yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, penyampaian informasi yang disampaikan secara tatap muka biasanya dilakukan di dalam

forum-forum dimana penyandang disabilitas tidak terlibat ataupun melalui sosialisasi yang tidak menjangkau penyandang disabilitas dari komunitas, rumah, dan pedesaan yang jauh dari akses teknologi.

- **Kontrol:** program pelatihan, pemagangan, dan bantuan usaha yang tersedia sering kali disesuaikan dengan perspektif, pengetahuan atau pengalaman dari perencana atau pelaksana program yang memiliki kemampuan dasar-lanjut, misalnya Disabilitas Tuli dengan kemampuan menjahit atau Disabilitas Netra dengan kemampuan memijat. Penyandang disabilitas tidak dapat menentukan pelatihan yang sesuai dengan bakat dan minat pribadinya.

- **Partisipasi:** program pemberdayaan ekonomi sering kali sudah dibatasi oleh perancang atau pelaksana program, sehingga partisipasi penyandang disabilitas di daerah rendah walaupun ruang partisipasi sudah dibuka melalui musyawarah perencanaan daerah.

- **Manfaat:** program pemberdayaan ekonomi dan pemberian bantuan sering kali tidak disertai dengan pemantauan terkait kemanfaatan yang diperoleh penyandang disabilitas serta terkait identifikasi persoalan ketika penyandang disabilitas yang sama mengikuti pelatihan maupun pemberian bantuan serupa beberapa kali.

2.6 Advokasi Inklusi Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi

Kelompok rentan tak terkecuali penyandang disabilitas sering kali menghadapi kesenjangan dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya. Situasi ini terjadi disebabkan beberapa persoalan, seperti lingkungan fisik dan transportasi yang tidak dapat diakses, ketidaktersediaan perangkat teknologi yang ramah ataupun media komunikasi yang aksesibel, kesenjangan dalam pemberian layanan, hingga adanya prasangka, stigma, dan diskriminasi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan serta mendorong keadilan dan kesetaraan di dalam pemberdayaan ekonomi, antara lain:

a) **Melakukan perubahan paradigma.** Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang berorientasi kepada hambatan serta kebutuhan penyandang disabilitas yang kemudian mendorong investasi pemberian kesempatan dan peningkatan keberdayaan/kemandirian penyandang disabilitas.

b) **Memperhatikan kebutuhan praktis, kebutuhan strategis dan kebutuhan khusus** penyandang disabilitas. Upaya-upaya pemenuhan kebutuhan tersebut akan membantu penyandang disabilitas untuk lebih mandiri.

c) **Memberikan dukungan sosial dan akomodasi yang layak sesuai kebutuhan kelompok rentan.** Dukungan fisik (seperti aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas) serta dukungan non fisik (seperti pelayanan, sikap dan tata nilai) akan mendorong kesetaraan penyandang disabilitas dalam akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat terhadap sumber daya ekonomi.

d) **Memastikan keberadaan dan implementasi kebijakan afirmasi.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus yang dapat terungkap, ditangkap, dipahami bersama serta dicatat sebagai prioritas pembangunan. Afirmasi juga bertujuan menemukan prioritas tahapan pemenuhan kebutuhan dan sebagai proses peningkatan kapasitas perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.

2.7 Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas

a. **Nondiskriminasi dan kesetaraan**: akses kepada layanan, program, bantuan dan manfaat keuangan tidak bersifat diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

b. **Aksesibilitas:** menerapkan prinsip aksesibilitas dan desain universal di dalam seluruh rancangan program.

c. **Inklusi dan partisipasi:** memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek dalam membicarakan kebutuhan khusus mereka, serta terlibat di dalam semua tahapan siklus program secara langsung.

d. **Kemitraan dan kolaborasi:** berbagai lembaga/organisasi memberikan dukungan penuh terutama kepada organisasi/komunitas penyandang disabilitas.

2.8 Penjangkauan, Pendampingan, dan Fasilitasi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas di Indonesia sering kali tidak terlihat dan tidak masuk dalam data kependudukan atau bahkan data penyandang disabilitas yang ada di Dinas Sosial atau Desa. Persoalan ini dikarenakan penyandang disabilitas sering kali terkurung di dalam rumah dan tidak mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sehingga melahirkan beragam stigma dan persepsi yang keliru serta membuat mereka tidak dikenal dan tidak dijangkau oleh program yang ada selama ini.

Untuk memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi tepat sasaran, perlu ada upaya menjangkau penyandang disabilitas melalui komunitas, RT/RW, kader desa atau sekolah luar biasa. Sebab, apabila mengandalkan data yang sudah ada dan mempertahankan komunikasi dengan organisasi disabilitas yang selama ini sudah bermitra dengan pemerintah, sering kali akan terjadi pengulangan penerima manfaat.

Hal lain yang sebaiknya juga menjadi perhatian adalah bahwa penyandang disabilitas tidak hanya memiliki keragaman hambatan (fisik, sensorik, mental, dan intelektual), melainkan juga keragaman latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan. Maka dari itu, proses pemahaman, interaksi sosial, kecakapan komunikasi dan kemampuan dalam menyerap keterampilan usaha juga beragam dan tidak dapat digeneralisasikan. Proses pendampingan inilah yang membutuhkan perhatian khusus dengan pendamping yang memahami persoalan dan hambatan tersebut.

1) Pemahaman teknik penjangkauan penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang tidak terlihat. Hal ini terdiri dari:

   a. Memahami situasi sosial penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

   b. Memahami keberadaan penyandang disabilitas dan kelompok rentan (data, ruang sosialisasi dan tempat tinggal).

   c. Memahami bagaimana menjangkau mereka yang tidak terdata maupun tidak terlihat dalam aktivitas sosial masyarakat.

2) Pemahaman metode perlibatan dan teknik fasilitasi penyandang disabilitas serta kelompok rentan di dalam berbagai kegiatan. Hal ini terdiri dari:

   a. Keterlibatan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain dalam program pemberdayaan ekonomi. Ini terbagi dalam beberapa level, yaitu perencana, pendamping program/fasilitator dan penerima manfaat langsung/pihak yang didampingi.

   b. Teknik memfasilitasi dan pendampingan kelompok rentan di dalam program pemberdayaan ekonomi. Ini bisa dilakukan dalam bentuk proses peningkatan kapasitas/pelatihan/lokakarya maupun proses pendampingan praktik usaha. Pelatihan terbagi menjadi pelatihan yang bersifat pengetahuan dan pelatihan teknis, baik di luar maupun dalam ruangan. Sedangkan pendampingan praktik usaha bisa dilakukan di ruang usaha yang disepakati dengan memperhatikan sumber data pendamping, komunikasi yang interaktif dan contoh langsung.

Di samping itu, fasilitator program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan harus memahami beberapa prinsip, yaitu memposisikan kelompok dampingan sebagai subjek bukan objek, partisipatif, dan memudahkan (aksesibel).

2.9 Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran

Pemantauan (*monitoring*) adalah aktivitas yang dilangsungkan terus-menerus dan sistematis untuk memastikan apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Pemantauan berguna dalam memberikan informasi penting terkait kemajuan dan hambatan program. Pemantauan dapat dilakukan seperti, melihat kemajuan dan ketidakmajuan, membuat tindakan-tindakan penting dalam implementasi program, menentukan prioritas sumber daya untuk beberapa program yang berjalan, serta mengumpulkan informasi untuk tujuan evaluasi.

Sementara itu evaluasi merupakan kegiatan yang antara lain bertujuan untuk mengukur kinerja program keseluruhan, meningkatkan desain program, membuat keputusan berbasis bukti yang jelas serta mengidentifikasi pengetahuan apa yang berjalan dan tidak berjalan beserta alasannya.

Sedangkan pembelajaran (*learning*) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan kemampuan berinisiasi dan mengelola perubahan, memanfaatkan pengetahuan dan promosi kelembagaan, serta menjadikan organisasi pembelajar.

Ketiga aktivitas tersebut dilakukan untuk dapat menilai proses perkembangan ekonomi disabilitas, dengan melihat:

- Perubahan apa yang ingin diidentifikasi?
- Tipe data yang akan dikumpulkan (kuantitatif atau kualitatif)?
- Kapan data akan dikumpulkan?
- Apa metode dan alat yang digunakan di dalam proses pengumpulan data?
- Dari mana data akan diambil?
- Bagaimana menjamin kualitas data yang baik?
- Bagaimana proses penulisan pembelajaran?

2.10 Strategi Penyampaian Informasi bagi Disabilitas

Informasi menjadi kebutuhan semua orang dan membuat siapa saja menjadi lebih berdaya serta memiliki kemampuan dan bertahan di dalam situasi yang tidak menguntungkan, seperti pandemi COVID-19. Namun, penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang teralienasi dalam mengakses informasi. Kendati media, format, dan teknik penyampaian informasi sudah sangat beragam pada era digital sekarang ini, tetapi keberagaman itu pun belum sepenuhnya menyentuh kelompok disabilitas. Sebab banyak dari informasi yang melimpah saat ini belum aksesibel dan menyulitkan penyandang disabilitas dalam mengakses dan memahami informasi itu. Kebutuhan penyandang disabilitas yang khas menjadi tantangan dalam memastikan informasi benar-benar sampai, dipahami, dan dapat digunakan untuk bertahan dan beradaptasi di dalam situasi pandemi COVID-19.

Contoh kebutuhan media informasi berdasarkan tiap ragam disabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Ragam Disabilitas	Sub-ragam Disabilitas	Kebutuhan atas Media Informasi
Disabilitas Fisik	Tubuh Mini	- Media cetak dengan pesan yang jelas dan spesifik terkait organ seksual dan reproduksi. - Media dalam bentuk video singkat yang jelas dan mudah dipahami dari sisi visual dan narasi suaranya.
	Cerebral palsy	- Video berdurasi singkat dan bukan berbentuk animasi dengan si pesan (konten) bermuatan teknis. - Video yang berisi konsep (misalnya tentang hak-hak asasi manusia) disertai dengan contoh. - Gambar memiliki visualisasi yang jelas, dan mudah dipahami. - Media cetak yang sebagian besar berisi teks harus disertai desain yang menarik, tulisan yang singkat dan sederhana, serta gambar yang jelas.

Disabilitas Sensorik	Netra total	- Penggunaan media suara menggunakan pesan yang jelas, asertif dan dapat memberikan visualisasi dalam imajinasi. - Penggunaan media pembelajaran menggunakan alat peraga tiga dimensi untuk membantu memvisualisasikan informasi.
	Netra *low vision* (penglihatan rendah)	- Media pembelajaran berbentuk audio visual. - Presentasi menggunakan gambar sederhana dengan tulisan ukuran besar dan memiliki pola dari halaman pertama hingga akhir. Pola yang dimaksud seperti sebuah halaman dibagi 4 (kiri atas, kanan atas, kiri bawah dan kanan bawah) yang masing-masing berisi informasi yang berbeda untuk memudahkan dalam memahami isi presentasi. - Menggunakan pasangan warna dengan perbedaan yang mencolok. Dalam presentasi statistik menggunakan pasangan warna merah dan oranye, atau pasangan warna biru dan ungu untuk balok atau garis yang berdekatan. - Film/video berdurasi panjang, misalnya lebih dari 1 jam disertai jeda antara 5-7 menit di beberapa bagian untuk mencegah mata lelah atau sakit.
	Rungu-wicara	- Penyediaan media berbentuk visual lengkap dengan teks narasi (*subtitle/closed caption*). - Menggunakan juru bahasa isyarat.
Disabilitas Intelektual	Grahita	- Menggunakan media audio-visual berdurasi pendek dengan pesan sederhana dan mudah dipahami. Media tidak perlu menggunakan *subtitle*, sebab mereka justru kesulitan dalam membaca dan memahami teks.

Disabilitas Mental	Hiperaktif	- Media berbentuk audio-visual berdurasi pendek dengan pesan sederhana dan mudah dipahami. - Penyampaian media bisa melibatkan orangtua atau keluarga (*care giver*) yang akan membantu meneruskan pesan.
	Autisme	- Media berbentuk audio visual dengan durasi pendek dan mampu menarik perhatian dalam jangka waktu sedikit. - Media disertai contoh langsung yang dapat diberikan melalui orang terdekat.
	Psikososial	- Media berbentuk audio visual, musik, atau gambar dengan informasi yang jelas dan singkat, serta cukup menarik untuk dilihat, didengar, dan dibaca berulang-ulang. - Penyampaian pesan disesuaikan dengan situasi dan kondisi kesehatan dan psikisnya.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana teknik penyampaian informasi kepada ragam dan subragam disabilitas menggunakan media aksesibel. Penyampaian informasi kepada penyandang disabilitas perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa catatan. Pertama, informasi harus disampaikan dengan akurat, lengkap, tidak terpotong-potong, tepat waktu, relevan serta murah diakses. Suatu informasi menjadi tidak berguna apabila tidak sesuai dengan situasi serta kebutuhan penerimanya.

Kedua, penyediaan informasi semaksimal mungkin dilakukan dengan format digital. Pada era digital saat ini, penyebaran informasi berlangsung cepat dan masif, meniadakan sekat ruang dan waktu serta memudahkan siapapun untuk berinteraksi dan bertukar pengalaman. Oleh karena itu, adanya media informasi yang aksesibel dalam format digital menjadi hal yang penting. Media digital sangat memungkinkan penyandang disabilitas mampu secara mandiri mengambil keputusan berkaitan dengan kesehatan diri dan keluarga termasuk pengembangan ekonomi dan upaya-upaya lain dalam beradaptasi di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian.

Setelah memastikan media informasi aksesibel sesuai dengan kebutuhan tiap ragam disabilitas, perlu dipastikan pula pemuatan informasi tersebut berlangsung lewat medium (situs web atau media sosial) yang aksesibel. Setiap organisasi atau lembaga pun tidak jarang memiliki situs web dan media sosialnya sendiri dalam menyebarkan informasi tentang berbagai program yang dijalankan dan informasi yang sesuai dengan fokus isunya. Sayangnya, penyandang disabilitas belum bisa mengakses informasi yang dimuat dalam kedua medium tersebut, sebab organisasi yang berkecimpung pada isu inklusi sosial pun belum tentu mempunyai situs web aksesibel atau memaksimalkan fitur-fitur aksesibilitas yang tersedia di media sosial.

Pemuatan informasi melalui situs web sebaiknya memperhatikan beberapa hal-hal berikut:

1) Sediakan fitur menu aksesibilitas yang dapat menyesuaikan kebutuhan ragam disabilitas ketika mengakses situs web.

2) Gunakan teks alternatif, deskripsi dan keterangan pada gambar untuk dibaca oleh aplikasi pembaca layar (*screen reader*) sekaligus membantu aplikasi mesin pencari (contoh: Google) mengenali situs web tersebut.

3) Membagikan tautan situs web ke media sosial disertai dengan keterangan konten yang termuat di dalamnya, misalnya berisi berita, video, atau musik.

4) Menggunakan tautan yang diperpendek (*shorterlink*) dalam menyebarkan tautan situs web yang panjang untuk memudahkan pembacaan oleh aplikasi pembaca layar.

5) Mengunggah video ke situs web perlu disertai *subtitle* baik langsung dari video maupun menggunakan fitur yang tersedia pada situs web serta penerjemah bahasa isyarat.

Pemuatan informasi melalui media sosial sebaiknya mempertimbangkan hal-hal berikut:

1) Menggunakan nama akun yang mudah dikenali sehingga Disabilitas Netra dapat dengan mudah menemukannya.

2) Gunakan fitur teks alternatif untuk mendeskripsikan visual yang akan dibaca oleh aplikasi pembaca layar.

3) Unggahan video perlu dipastikan sudah disertai *subtitle* dan penerjemah bahasa isyarat di dalamnya.

4) Libatkan juru bahasa isyarat dan notulen ketika melakukan siaran langsung.

5) Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti baik pada teks utama maupun teks pendamping gambar (*caption*).

Bagian III

Silabus Pelatihan

Silabus pelatihan yang tersedia di dalam modul merupakan contoh, bukan rumusan pasti. Penyelenggara pelatihan punya kebebasan dalam melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan situasi yang berkembang di lapangan, seperti waktu yang tersedia, latar belakang peserta dan ruangan tempat pelatihan.

Materi		Alat/Bahan	Durasi (menit)
Pemahaman Gender dan Disabilitas			
Sub topik 1	Pemahaman disabilitas (konsep dan keberagaman disabilitas)	Metode: paparan disertai diskusi interaktif Bahan/alat: presentasi dan poster	40 menit
Sub topik 2	Pemahaman gender (keadilan, kesetaraan dan afirmasi gender)	Metode: paparan disertai diskusi interaktif Bahan/alat: presentasi dam poster	40 menit
Sub topik 3	Keterkaitan gender dan disabilitas	Metode: diskusi kelompok dan presentasi kelompok Bahan/alat: bahan bacaan, lembar kasus dan lembar kerja	40 menit

Inklusi Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi bagi Kelompok Rentan			
Sub topik 1	Pemahaman tentang inklusi dan ekslusi (bagaimana situasi dan proses terjadinya inklusi sosial): peran dan posisi kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam masyarakat.	Metode: bermain peran, curah pendapat, pendapat, diskusi dan presentasi. Bahan/alat: presentasi, dan lembar pertanyaan kunci.	40 menit
Sub topik 2	Gender dan disabilitas analisis dalam pemberdayaan ekonomi: melihat keadilan dan kesetaraan gender-disabilitas melalui 4 indikator (akses, kontrol, partisipasi dan manfaat) di ruang domestik dan publik.	Metode: diskusi kelompok dan presentasi Bahan/alat: presentasi dan lembar pertanyaan kunci	120 menit
Sub topik 3	Advokasi membangun inklusi sosial dalam pemberdayaan ekonomi.	Metode: diskusi kelompok dan presentasi. Bahan/alat: presentasi dan lembar pertanyaan kunci.	40 menit
Sub topik 4	Prinsip-prinsip dalam pengembangan ekomi yang inklusi.	Metode: diskusi kelompok dan presentasi. Bahan/alat: presentasi dan lembar pertanyaan kunci.	40 menit
Sub topik 5	Pemantauan, evaluasi dan pembelajaran *(monitoring, evaluation, learning*/MEL) dalam pemberdayaan ekonomi.	Metode: diskusi kelompok dan presentasi. Bahan/alat: presentasi dan lembar pertanyaan kunci.	40 menit

Penjangkauan, Pendampingan dan Fasilitasi Penyandang Disabilitas			
Sub topik 1	Pemahaman teknik penjangkauan penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang tidak terlihat	Metode: diskusi kelompok dan presentasi. Bahan/alat: presentasi dan lembar pertanyaan kunci.	120 menit
Sub topik 2	Pemahaman metode pelibatan dan teknik fasilitasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam berbagai kegiatan	Metode: berbagi peran. Bahan/alat: skenario berbagi peran.	180 menit
Strategi Penyampaian Informasi bagi Disabilitas			
Sub topik 1	Pemahaman tentang keragaman disabilitas dan kebutuhan aksesibilitas yang dibutuhkan sesuai jenis media	Metode: presentasi dan diskusi interaktif. Bahan/alat: presentasi dan contoh-contoh media informasi yang aksesibel (video, situs web).	40 menit
Sub topik 2	Teknik penyampaian informasi kepada ragam dan subragam disabilitas dengan menggunakan media aksesibel	Metode: presentasi dan diskusi interaktif. Bahan/alat: presentasi dan contoh-contoh media informasi yang aksesibel (video, situs web).	60 menit

Penutup

Modul pelatihan disusun dengan melalui proses uji coba dan mendapatkan masukan perbaikan dari para fasilitator yang mempraktikkannya di lima daerah wilayah proyek ACTION (Warga Aktif Membangun Solidaritas dan Ketahanan dalam Merespon COVID-19), yaitu Kota Yogyakarta, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, Kota Makasar dan Kabupaten Lombok Timur.

Kendati demikian, sebagai sebuah arsip pengetahuan, modul ini harus terus-menerus mendapatkan perbaikan untuk merespons konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Perkembangan teknologi informasi pun juga terus mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat dengan berbagai lompatan pertemuan.

Menyadari situasi tersebut, penggunaan modul ini hendaknya dilakukan dengan juga memperhatikan perubahan-perubahan sosial, budaya dan teknologi yang ada, sehingga model pelatihan menjadi terus terbarukan dan tidak mengulang-ngulang materi yang sudah usang.

Daftar Pustaka

Erlin Sudarwati, (2016). Artikel Penyandang Disabilitas (*online*). URL: https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-dissabilitas.html#. Diakses 23 Januari 2021.

Irwanto dkk, (2010), Siradj Okta Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review/

Mujimin. (2007). Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Disabilitas . Jurnal Dinamika Pendidikan, 60-75.

Mukhotib MD dkk (2021), Panduan Media Aksesibel, SAPDA.

Nurul Saadah Andriani (2015), Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja Dengan Disabilitas: Panduan Untuk Orangtua dan Pendamping.

Nurul Saadah Andriani (2020), Materi presentasi "Mengenal Penyandang Disabilitas: Pendekatan, Hambatan dan Bagaimana Berinteraksi".

Nurul Saadah Andriani dkk (2015), Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja Dengan Disabilitas: Panduan Untuk Orangtua dan Pendamping.

Rodiah, M. M. (2014). Pemberdayaan kelompok Disabilitas Melalui Kegiatan Ketrampilan Handicraft dan Woodwork Di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan. Repository.uinjkt. ac.id.

Surwanti, A. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis, 5 (1), 40-58.

Widiantoro, W., Wartono, dan Sinta, A. (2016). Pemberdayaan Warga Difabel Kunci Sukses Penggalian Potensi dalam Bidang Bisnis. Prosiding Seminar Nasional Psikologi “Aktualisasi Potensi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas", 55-61. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.

Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare), 20 (2).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disablitas.